



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

**PEMERINGKATAN  
E-GOVERNMENT INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017**

DIREKTORAT *E-GOVERNMENT*  
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
2017

## **Pengarah**

Firmansyah Lubis – Direktur *e-Government* Kementerian Kominfo

## **Editor**

Hari Singgih Noegroho

## **Asesor**

*(urut berdasarkan nama)*

Dana Indra Sensuse – Akademisi / UI

Hari Singgih Noegroho – INSW

Niki Maradona – Kementerian Kominfo

## **Tim Pendukung**

Arief Rachman

Iwan Setiadi

Luthfi Turmudzi

Syamsul Arip

Wahyumardi



## **KATA SAMBUTAN DIREKTUR E-GOVERNMENT**

Kegiatan Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK secara Nasional.

Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2007 oleh Direktorat *e-Government* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di tahun 2017 ini, kegiatan PeGI juga dilakukan secara mandiri di beberapa instansi, salah satunya Provinsi Sumatera Barat, untuk melihat kondisi implementasi *e-government* di instansinya seperti tertuang dalam laporan ini.

Selain PeGI, saat ini juga telah dilakukan kegiatan sejenis oleh Media, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat lainnya dalam bentuk *e-government Awards* ataupun penghargaan TIK yang lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu mendukung seluruh



upaya tersebut karena turut berperan dalam memotivasi pertumbuhan dan pengembangan TIK secara nasional khususnya di bidang *e-government*.

Saya menyambut baik laporan hasil PeGI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan semoga dapat memberikan pemahaman akan pentingnya TIK pada umumnya dan *e-government* pada khususnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat .

Salam e-government,

Jakarta, Desember 2017

Firmansyah Lubis



## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>2. TUJUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>3. STRATEGI IMPLEMENTASI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DIMENSI PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA .....</b>	<b>5</b>
4.1. KEBIJAKAN .....	5
4.2. KELEMBAGAAN.....	6
4.3. INFRASTRUKTUR .....	7
4.4. APLIKASI.....	8
4.5. PERENCANAAN .....	10
<b>5. METODOLOGI PEMERINGKATAN.....</b>	<b>10</b>
<b>6. HASIL PEMERINGKATAN.....</b>	<b>13</b>
6.1. HASIL ASESMEN PROVINSI SUMATERA BARAT .....	13
6.1.1. Tabel Hasil Keseluruhan .....	13
6.1.2. Grafik Radar 5 Dimensi.....	14
6.1.3. Hasil Penilaian Kualitatif.....	14



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI .....	4
Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI .....	10
Gambar 6-1 Grafik Lima Dimensi Provinsi Sumbar .....	14



## DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Provinsi Sumatera Barat. 13







## **PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT*ERMENT INDONESIA (PeGI)**

### **1. PENDAHULUAN**

Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) di Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat) merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif Provinsi Sumatera Barat, yang melibatkan Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Sumatera Barat. Hasil PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya, KEMKOMINFO bekerja sama dengan Akademisi dan INSW untuk menjadi Tim Asesor PeGI Provinsi Sumatera Barat .

### **2. TUJUAN**

Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.



2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terkait dengan tujuan pertama, PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga non kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

Sehubungan dengan tujuan kedua, PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang memberikan kontribusi bagi suksesnya pengembangan dan implementasi *e-government*, bukan hanya aspek-aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja. Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi



subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi.

Sebagai tujuan ketiga, dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. Dengan demikian dapat diketahui kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa datang.

Selain dari ketiga tujuan tersebut, ketika PeGI dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun, maka akan dapat dilihat trend perkembangan implementasi TIK di instansi sehingga bisa dilihat apakah instansi tersebut cenderung menurun atau cenderung membaik.

### **3. STRATEGI IMPLEMENTASI**

Untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan PeGI, disusun strategi sebagai berikut:

- Evaluasi menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak;
- Metode, hasil evaluasi, dan kajian dipublikasikan secara luas;

- Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuannya.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang dijabarkan secara sederhana agar semua pihak yang terkait dapat mengerti dan menangkap dengan jelas kriteria yang digunakan. Metode dan hasil evaluasi akan dipublikasikan secara luas terutama pada pihak-pihak yang terkait dan juga pada masyarakat sehingga proses pemeringkatan akan berjalan secara transparan.

Gambar 3.1 menggambarkan strategi implementasi PeGI secara konseptual.



Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI



## **4. DIMENSI PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA**

Dalam kegiatan PeGI, telah ditetapkan lima dimensi yang akan dikaji, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

### **4.1. KEBIJAKAN**

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.



- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah.
- Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

#### **4.2. KELEMBAGAAN**

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer* (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.



- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

#### **4.3. INFRASTRUKTUR**

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- *Data center* dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain *AC*, *UPS*, *Genset*, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.



- Inventarisasi peralatan TIK.

#### **4.4. APLIKASI**

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

- Adanya situs web (*homepage*).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.





Aplikasi-aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan yang terdiri dari antara lain:

1. Pelayanan publik, seperti pendudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
3. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
4. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
6. Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.



## 4.5. PERENCANAAN

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain: adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK, adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya dokumentasi *Master Plan* yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari *Master Plan* yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

## 5. METODOLOGI PEMERINGKATAN

Dalam pelaksanaannya, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 5.1.



Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI

Penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut:



1. Calon peserta dijelaskan proses pelaksanaan dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang mendukung proses penilaian. Dengan demikian, calon peserta mendapatkan informasi tentang tata-cara pemeringkatan, dimensi dan indikator yang dievaluasi serta cara mengisi kuesioner.
2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami tata cara pemeringkatan, peserta dipersilakan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan.
3. Setelah kuesioner terisi dan dilengkapi dengan informasi pendukung, asesor melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban.
4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, *e-mail* atau dengan melihat ke lokasi.
5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan pemeringkatan tiap peserta. Pemeringkatan yang diberikan meliputi pemeringkatan tiap dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta.
6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi.
7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan ditentukan melalui sidang asesor.



8. Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan dipublikasikan melalui berbagai media, situs *web* dan juga seminar agar diketahui masyarakat umum.

Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$3,50 \leq \textbf{SANGAT BAIK} \leq 4,00$$

$$2,50 \leq \textbf{BAIK} < 3,50$$

$$1,50 \leq \textbf{KURANG} < 2,50$$

$$1,00 \leq \textbf{SANGAT KURANG} < 1,50$$



## 6. HASIL PEMERINGKATAN

### 6.1. HASIL ASESMEN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 6.1.1. Tabel Hasil Keseluruhan

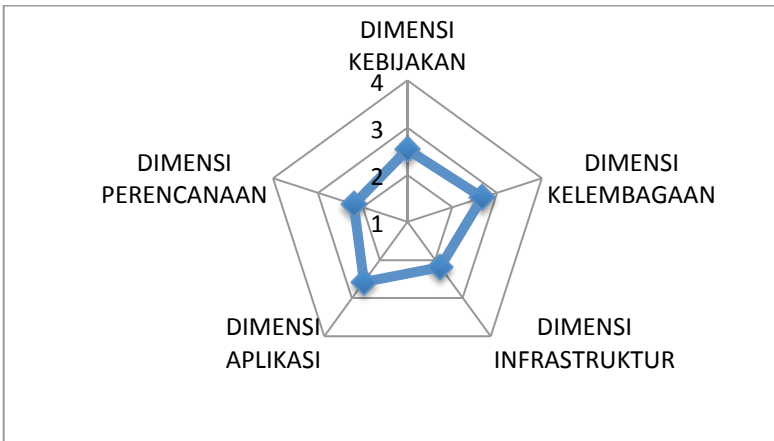
Tabel 6.1 menunjukkan hasil pemeringkatan *e-government* untuk Provinsi Sumatera Barat , dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah **2,43** dan termasuk dalam kategori **KURANG**.

Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Provinsi Sumatera Barat

NO	Provinsi	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi Sumatera Barat	2.54	2.67	2.19	2.61	2.13	2.43	Kurang



### 6.1.2. Grafik Radar 5 Dimensi



Gambar 6-1 Grafik Lima Dimensi Provinsi Sumbar

### 6.1.3. Hasil Penilaian Kualitatif

#### Tata Cara Asesmen:

1. Sebelum asesmen, peserta telah menerima informasi tentang persiapan yang perlu dilakukan, yang meliputi kriteria penilaian, data pendukung dan perwakilan yang kompeten.
2. Peserta mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara asesmen dalam sesi penjelasan yang dilakukan sebelum asesmen.
3. Asesmen dilakukan terhadap indikator yang dapat diperlihatkan, dijelaskan, diperiksa, dan dinilai selama asesmen.



## Rangkuman Asesmen Provinsi Sumatera Barat

Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Provinsi Sumatera Barat adalah **KURANG**. Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu, penilaian juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan. Berikut ini diuraikan penilaian penerapan *e-government* pada Provinsi Sumatera Barat berdasarkan masing-masing dimensi.

### 1. Kebijakan

Nilai dimensi Kebijakan untuk Provinsi Sumatera Barat telah meningkat dari status Kurang pada 2015 menjadi status **BAIK (2,54)** pada 2017. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator peningkatan dari hasil assesment sebelumnya sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

1. Telah ada dukungan pimpinan terhadap pengembangan e-government dan masuk dalam visi misi Pemerintah Provinsi;
2. Telah ada prioritas pengembangan dalam kebijakan e-government yang telah dimasukkan pada RPJMD;



3. Telah ada beberapa peraturan penting berkaitan dengan pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Telah dibuat beberapa keputusan terkait pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Telah ada inisiatif kebijakan melakukan perbaikan dengan pengadaan evaluasi perkembangan e-government internal dengan inisiatif penilaian e-government mandiri yang dilaksanakan dalam penilaian ini.

Indikator negatifnya ialah:

1. Belum ada kejelasan penyusunan kelengkapan Pedoman sebagai turunan dari Kebijakan yang diterbitkan, untuk ketertiban dan kesinambungan penerapan seluruh kebijakan yang dibuat untuk penerapan e-government;
2. Peraturan atas hal terkait TIK baru satu yang dibuat dan masih draft;
3. Masih juga belum ada program tetap untuk evaluasi e-government atau manajemen resiko berkala dan menyeluruh bagi





pemantauan rencana dan realisasi pengembangan maupun manfaat terapan e-government yang sudah berjalan.

Saran perbaikan untuk dimensi Kebijakan antara lain:

1. Masih perlu melengkapi seluruh dukungan Pimpinan terhadap pengembangan dan penerapan e-government secara tertulis, sehingga akan mempunyai kekuatan legalitas yang lebih jelas dan terarah;
2. Masih diperlukan kebijakan yang mengatur langkah-langkah evaluasi internal yang sudah dilakukan, untuk menilai realisasi peraturan, keputusan dan pedoman yang berkaitan dengan pengembangan e-government, hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan tindakan pengendalian internal yang ada dan lebih mendorong perbaikain upaya pengembangan dan penerapan e-government yang strategis dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Masih diperlukan terapan manajemen resiko sebagai penilaian atas setiap risiko yang dijumpai dalam evaluasi internal, agar pengembangan e-government terhindar dari semua risiko administrative maupun



opersional dalam optimalisasi pemanfaatan e-government yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Kelembagaan

Nilai dimensi Kelembagaan untuk Provinsi Sumatera Barat berkembang dari status Kurang menjadi **BAIK (2,67)**. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang berhasil dihimpun sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

1. Telah dilakukan perbaikan struktur kelembagaan dan pelaksana kendali e-government yang memadai, dengan terbentuknya Dinas Kominfo type B dengan 3 Bidang pendukungnya, sebagai bentuk nyata komitmen dan pengertian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pentingnya peran e-government dalam Manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Telah adanya penjelasan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit kerja yang ada di Peraturan Daerah;



3. Telah adanya SOP yang berkaitan dengan e-government, meskipun masih kurang lengkap;
4. Telah adanya inventarisasi terhadap kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mendukung pengembangan dan penerapan e-government;
5. Telah ada indikasi penyiapan sarana untuk pelatihan-pelatihan e-government dalam mendukung pengembangan SDM.

Indikator negatifnya ialah:

1. Belum adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk menjalankan peran CIO / penanggung jawab informasi yang menentukan arah bagi penyelenggaraan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tegas dan jelas;
2. Belum ada perhatian atas kesinambungan pengembangan karier dan keahlian SDM yang sudah tersedia dan berkualitas yang baik, hal tersebut ditunjukkan masih banyak yang berstatus honorer.

Saran perbaikan untuk dimensi kelembagaan adalah :



1. Perlu penetapan CIO untuk dapat merencanakan kebutuhan data dan informasi yang menjadi dasar pengembangan e-government bagi seluruh OPD dan pimpinan yang terarah dan strategis;
2. Perlu perencanaan pengembangan keahlian internal Dinas Kominfo untuk diselaraskan dengan pengembangan karier pelaksana dengan keahlian teknis khususnya;
3. Perlu penyempurnaan penataan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Bidang sesuai dengan siklus manajemen informasi yang terdiri dari proses transaksi layanan seluruh OPD (online transaction), proses pemeliharaan dan pengamanan data dan informasi hasil proses layanan (data custodian/librarian), proses informasi untuk statistik dan analisa untuk pembuatan keputusan, dan pelaksana operasi layanan TIK dan infrastruktur pendukungnya;
4. Perlu evaluasi atas SOP yang ada dan SOP yang belum tersedia dan sangat diperlukan, untuk mendukung percepatan pengembangan dan penerapan e-government yang lebih menyeluruh;



5. Perlu adanya pemberdayaan dan koordinasi bersama di seluruh OPD untuk mendukung penerapan e-government untuk administrasi pemerintahan, layanan publik dan manajemen pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat;
6. Perlu adanya penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan SDM yang sudah ada agar lebih terarah dan terencana baik.

### 3. Infrastruktur

Nilai dimensi Infrastruktur untuk Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibanding sebelumnya, di mana pada 2017 ini mendapatkan nilai **KURANG (2.19)**. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

1. Telah tersedia infrastruktur jaringan komunikasi data pendukung operasi e-government bagi seluruh OPD dan satuan kerja yang memerlukan, di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Jaringan yang ada telah dilengkapi dengan sistem keamanan jaringan e-government yang



cukup memadai, mulai dari *firewall*, antivirus dan keamanan lainnya;

3. Indikasi tertib administrasi atas barang milik negara termasuk sarana TIK yang cukup baik.

Indikator negatifnya ialah:

1. Baru tersedia ruang server , belum dibuat data center dan ruang kendali jaringan yang memadai, dalam rencana, namun belum terrealisasi meski ruang sudah tersedia;
2. Belum ada fasilitas yang memadai untuk pengamanan piranti lunak, informasi, sistem dan prosedur pengamanan, terutama untuk mengatasi keadaan darurat;
3. Belum tersedia fasilitas pendukung yang memadai untuk kesinambungan pengoperasian dan pengamanan sarana TIK yang dipergunakan dalam terapan e-government, yang diperlukan untuk melengkapi data center;
4. Belum memiliki fasilitas untuk Data dan Disaster Recovery, baik prosedur maupun prasana pendukungnya.

Saran perbaikan untuk dimensi Infrastruktur adalah:



1. Perencanaan pembangunan Data Center di lokasi yang sudah ada perlu sekaligus dilengkapi dengan fasilitas pendukung sistem udara, keamanan infrastruktur dan lingkungan, agar memenuhi persyaratan sebagai data center, dan bukan sekedar ruang server;
2. Perlu menyiapkan proses pemeliharaan komputer dan sarana pendukung yang terkelola dengan baik dan lengkap dengan log pemeliharaan tercatat baik, sebagai bagian dari sistem manajemen asset penting bagi Pelaksanaan operasi;
3. Perlu perencanaan Disaster Recovery, penyimpanan data yang aman terhadap bahaya api dan air, pendukung keadaan darurat yang bisa merusak bukan hanya sarana tetapi juga informasi yang tersedia.

#### 4. Aplikasi

Nilai dimensi Aplikasi untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, di mana pada 2017 ini memiliki nilai **BAIK (2.61)**. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:



1. Telah tersedia situs yang isinya terpelihara baik dengan update setia hari kerja, sebagai media komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan masyarakat secara luas;
2. Telah tersedia beberapa aplikasi-aplikasi penting untuk penggunaan e-government masing-masing OPD untuk mendukung administrasi keuangan, Akuntansi, kepegawaian, perencanaan & realisasi pembangunan, dan juga pelayanan publik;
3. Seluruh Aplikasi dikembangkan dengan Open Source dan bisa dipelihara secara internal tanpa ketergantungan kepada vendor;
4. Administrasi Legislasi yang terlaksana dengan baik sebagai media JDIH untuk Publik (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum).

Indikator negatifnya ialah:

1. Masih ada aplikasi yang dipelihara dan dikendalikan sendiri oleh OPD secara independent, dengan adanya Dinas khusus yang menangani TIK dan e-government, seharusnya OPD hanya menjadi pengguna dan pemilik informasi, pemeliharaan, pengoperasian sarana dan pengembangan





- aplikasi perlu diserahkan ke Dinas terkait, adanya penyimpangan manajemen TIK tersebut menjadi indikator proses pemeliharaan TIK dan aplikasi dalam cakupan e-government menjadi tidak optimal;
2. Belum didukung dengan administrasi dokumen, user manual, dan source-code aplikasi secara terpusat di Dinas Kominfo, yang sangat penting bagi kemudahan pemeliharaan bila ada perubahan atau masalah;
  3. Terapan interoperabilitas antar sistem sangat terbatas hanya pada layanan SAMSAT, perlu diperluas untuk, mengintegrasikan proses administrasi dan keuangan, proses layanan publik yang memerlukan verifikasi online atas kelayakan data kependudukan dan relasi ke layanan keuangan / perbankan untuk proses pembayaran PAD bila ada, Semuanya memerlukan relasi dan penggunaan data bersama atau proses layanan berkesinambungan yang hanya bisa dilakukan apabila didukung dengan fasilitas interoperabilitas yang memenuhi standar keamanan informasi.



Saran perbaikan untuk dimensi Aplikasi adalah:

1. Perlu inventarisasi proses layanan publik OPD yang belum menggunakan e-government secara efektif, sebagai dasar perencanaan pengembangan e-government bagi kemudahan layanan publik;
2. Perlu merencanakan integrasi manajemen anggaran, SDM, keuangan, pemeliharaan barang milik negara, dan unsur terkait administrasi keuangan, dengan sistem akuntansi, untuk peningkatan efisiensi administrasi dan akurasi data laporan;
3. Perlu adanya tata kelola aplikasi terpusat, menyeluruh dan dengan tanggung jawab yang jelas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Perlu adanya perencanaan dan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan menambah fasilitas interoperabilitas di antara aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga e-government benar-benar bermanfaat dan bisa menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah unggulan dalam terapan e-government.



## 5. Perencanaan

Nilai dimensi Perencanaan untuk Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi **2,13 (KURANG)**. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

1. Telah diatur rencana pengembangan TIK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada dibawah kendali Dinas Kominfo, sehingga diharapkan terjadi harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi infrastruktur, sarana dan aplikasi e-government dengan berperannya Dinas Kominfo.

Indikator negatifnya ialah:

1. Belum didukung dengan dokumentasi rencana induk pengembangan TIK dan penerapan e-government ditunjang dengan tujuan manfaat yang jelas dan mendapat persetujuan dari para pihak yang berwenang sebagai komitmen jangka panjang;
2. Belum adanya rencana pengembangan dan implemtasi e-government yang jelas dan memadai, yang seharusnya menjadi bagian dari turunan rencana induk e-government;



3. Pembiayaan cukup besar bila dilihat dari cakupan kegiatan e-government yang ada, namun sebagian besar untuk menutup biaya rutin, perlu penataan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan berkembang.

Saran perbaikan untuk dimensi Perencanaan adalah:

1. Perlu segera dipersiapkan rencana induk yang melengkapi rencana pengembangan e-government dalam RPJMD;
2. Sangat diperlukan analisa kesenjangan antara fasilitas dan tatakerja e-government bagi seluruh OPD saat ini , bila dibandingkan dengan Provinsi dengan nilai peringkat e-government terbaik, agar dapat disusun rencana pengembangan dan prioritasnya menuju Sumatera Barat sebagai Provinsi dengan fasilitas e-government yang paling tepat guna dan efektif ( Tidak harus dengan investasi mahal);
3. Perlu turunan rencana dan prioritas hasil analisa kesenjangan fasilitas e-government, untuk dapat menjadi bagian dari rencana induk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat;



4. Perlu adanya koordinasi dengan OPD, agar tidak ada rencana pengembangan TIK dan e-government sendiri diluar kendali Dinas Kominfo;
5. Perlu penataan biaya operasi dan investasi, agar manfaat uang anggaran yang dibelanjakan menjadi optimal.